CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# DEMOKRASI YANG BERJIWA PANCASILA: ANTARA KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI CERMIN BANGSA INDONESIA

**Syifa Nur Azizah, Cristabel Raissa Agusta**

**Email: cristabelagusta0311@gmail.com, syifaazizah2608@gmail.com**

**Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi**

**Abstract**

*Pancasila democracy is a democratic system unique to Indonesia that is based on the values of Pancasila, especially the balance between freedom and responsibility. However, in its actual implementation, Indonesian democracy after the reform still faces several problems, such as the dominance of political elites, pragmatic political practices, money politics, and manipulation of public opinion through buzzer accounts in digital media. This study aims to examine the concept of Pancasila democracy, its development in Indonesian political history, as well as the challenges and efforts to strengthen Pancasila democracy today. This study uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing various sources such as academic works, official reports from institutions, and news from the media. The results of the study show that although the reform succeeded in opening up freedom in politics, democratic practices still seem routine and do not fully reflect the values of Pancasila. Democracy is often influenced by elite power, power exchanges, and the spread of misinformation through digital media. In conclusion, to strengthen Pancasila democracy, structural changes are needed that prioritize moral values, social justice, and political responsibility as the main foundations so that democracy is not only free but also civilized and fair.*

**Keywords**: *Pancasila democracy, political freedom, responsibility, Pancasila values*

**Article History**
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**Abstrak**

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Akan tetapi, dalam penerapan nyatanya, demokrasi Indonesia setelah reformasi masih menghadapi beberapa masalah, seperti dominasi kelompok elite politik, praktik politik pragmatis, politik uang, serta manipulasi opini masyarakat melalui akun buzzer di media digital. Penelitian ini bertujuan menguji konsep demokrasi Pancasila, perkembangan penerapan dalam sejarah politik Indonesia, serta tantangan dan upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi Pancasila di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan menganalisis berbagai sumber seperti karya akademik, laporan resmi lembaga, dan berita dari media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi berhasil membuka ruang kebebasan dalam politik, praktik demokrasi masih terkesan rutin dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan elite, tukar-menukar kekuasaan, serta penyebaran informasi yang salah melalui media digital. Kesimpulannya, untuk memperkuat demokrasi Pancasila diperlukan perubahan secara struktural yang mengutamakan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab politik sebagai dasar utama agar demokrasi tidak hanya bebas, tetapi juga beradab dan adil.

**Kata kunci:** Demokrasi Pancasila, kebebasan politik, tanggung jawab, nilai Pancasila

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah fondasi penting dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Di tangan rakyat lahirlah kekuasaan tertinggi, karena rakyat adalah yang utama dalam proses politik. Di Indonesia, demokrasi tidak hanya diartikan sebagai pemilihan umum atau prosedur politik biasa, tetapi juga sebagai sistem yang berasal dari nilai-nilai sosial, budaya, dan moral bangsa, yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi khas Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan kebebasan individu tanpa batas, atau demokrasi komunis yang mengutamakan kepentingan negara daripada hak individu.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berfungsi sebagai penjaga nilai moral agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam liberalisme ekstrem atau otoritarianisme (Sudrajat, 2013; Cholisin, 2007). Fadlail (2023) menekankan bahwa nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan landasan etika yang membedakan demokrasi Indonesia dari sistem demokrasi lainnya.

Namun, dalam praktiknya, perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang rumit. Pada masa Orde Baru, stabilitas politik dicapai melalui pengumpulan kekuasaan di satu titik, tetapi mengorbankan kebebasan dan partisipasi rakyat. Di era Reformasi, kebebasan politik ditawarkan secara luas, tetapi justru muncul berbagai masalah seperti dominasi para elite, politik pragmatis, uang dalam politik, serta manipulasi opini rakyat melalui buzzer dan informasi palsu. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dan pembantuannya oleh para elite tetap menjadi pelanggaran utama dalam pemilu, yang mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat dan membuat demokrasi menjadi transaksional (KPK; ICW). Penelitian Merlyna Lim (2019), serta penelitian ASPIKOM (2022) dan UIN Jakarta (2023) juga menunjukkan bahwa buzzer politik berperan besar dalam membentuk persepsi publik secara tidak jujur, sehingga demokrasi cenderung bergerak ke arah yang didominasi oleh para elite dan menjauh dari prinsip diskusi rasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dari Demokrasi Pancasila dengan praktik demokrasi saat ini, di mana kebebasan politik belum sepenuhnya diiringi tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Demokrasi Pancasila dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan sejarah demokrasi Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya di masa modern, serta merumuskan usaha untuk memperkuat demokrasi yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga memperkuat demokrasi sebagai sistem politik yang beretika, adil, dan memiliki jiwa Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami secara mendalam tentang konsep, dinamika, serta tantangan dalam demokrasi Pancasila. Penelitian ini melakukan analisis terhadap pemikiran serta fenomena sosial dan politik yang berkaitan. Untuk memilih sumber data, peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu memilih sumber yang relevan dan dapat dipercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan dari lembaga resmi seperti KPK dan ICW, serta berita dari media nasional.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan kajian pustaka, yang mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis isi, yaitu mengidentifikasi tema utama, pola pemikiran, serta hubungan antara teori demokrasi Pancasila dengan praktik demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis agar menghasilkan pemahaman yang menyeluruh.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**HASIL**

Berdasarkan kajian literatur dan analisis konseptual yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Demokrasi Pancasila di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai ideal yang diamanatkan dalam Pancasila. Meskipun era Reformasi telah membuka ruang kebebasan politik yang lebih luas, pelaksanaan demokrasi cenderung berjalan secara prosedural dan belum disertai penguatan dimensi etika, moral, serta tanggung jawab sosial. Selain itu, dominasi elite politik, praktik politik uang, dan pemanfaatan media digital untuk membentuk opini publik melalui disinformasi menjadi faktor yang turut melemahkan substansi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik kontemporer.

**PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila secara konseptual dirancang sebagai sistem demokrasi yang menempatkan nilai moral dan etika sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Demokrasi ini tidak hanya menekankan aspek prosedural seperti pemilu dan perwakilan politik, tetapi juga mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar setiap praktik politik dilandasi oleh etika dan moralitas, sehingga kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak digunakan untuk merusak martabat manusia atau memecah persatuan. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses demokrasi, termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas dan penolakan terhadap praktik diskriminatif. Sementara itu, nilai Persatuan Indonesia berfungsi sebagai penyangga agar dinamika demokrasi yang kompetitif tidak berkembang menjadi konflik sosial yang merusak kohesi bangsa.

Dalam praktiknya, prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seharusnya menjadi inti dari Demokrasi Pancasila. Musyawarah mufakat diposisikan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang mencerminkan kebijaksanaan kolektif, bukan sekadar dominasi suara mayoritas. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik demokrasi kontemporer, mekanisme deliberatif ini semakin terpinggirkan oleh logika elektoral yang pragmatis. Proses politik cenderung diarahkan pada pencapaian kemenangan elektoral melalui mobilisasi modal, dukungan elite, dan pencitraan simbolik, daripada melalui adu gagasan dan pertimbangan rasional yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Akibatnya, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan dimensi etik dan substansial sebagaimana diidealkan dalam Pancasila. Analisis terhadap perkembangan demokrasi pascareformasi menunjukkan bahwa kebebasan politik yang luas tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas demokrasi. Reformasi memang berhasil mengakhiri sentralisasi kekuasaan ala Orde Baru dan membuka ruang bagi kebebasan pers, multipartai, serta partisipasi masyarakat sipil. Namun, hilangnya kontrol kekuasaan yang kuat juga melahirkan fragmentasi politik dan lemahnya konsolidasi institusi. Dalam konteks ini, demokrasi justru rentan dikuasai oleh elite politik dan aktor ekonomi yang memiliki sumber daya besar. Politik uang dan patronase menjadi instrumen dominan dalam kontestasi politik, sehingga relasi antara rakyat dan wakilnya berubah menjadi relasi transaksional. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

institusional berpotensi mereduksi demokrasi menjadi sekadar mekanisme perebutan kekuasaan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru yang signifikan terhadap kualitas demokrasi Pancasila. Ruang publik digital yang seharusnya menjadi medium deliberasi justru sering dimanfaatkan untuk membangun narasi manipulatif melalui buzzer politik, disinformasi, dan polarisasi identitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa buzzer tidak lagi berfungsi sebagai komunikator politik biasa, melainkan sebagai aktor terorganisir yang secara sistematis membentuk opini publik dan memproduksi citra legitimasi politik. Praktik ini menciptakan kondisi di mana persepsi publik lebih dipengaruhi oleh konstruksi narasi digital dibandingkan evaluasi rasional terhadap kapasitas dan rekam jejak aktor politik. Situasi tersebut menggeser demokrasi dari ruang deliberatif menuju apa yang dapat disebut sebagai demokrasi semu, di mana citra politik menggantikan substansi demokrasi itu sendiri. Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan dan keadilan sosial. Ketika legitimasi politik dibangun melalui manipulasi informasi dan transaksi kekuasaan, maka rakyat tidak lagi menjadi subjek utama demokrasi, melainkan objek mobilisasi politik. Keadilan sosial yang seharusnya menjadi tujuan akhir demokrasi pun terpinggirkan, karena kebijakan publik cenderung lebih berpihak pada kepentingan elite daripada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada aspek kebebasan politik, tetapi pada kegagalan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi sehari-hari.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan Demokrasi Pancasila memerlukan pendekatan yang lebih struktural dan substantif. Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur elektoral, melainkan harus diposisikan sebagai sistem nilai yang menuntut integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Tanpa upaya serius untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik, demokrasi Indonesia berisiko terus bergerak dalam lingkaran kebebasan tanpa arah, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik dan menggerus kualitas kehidupan demokratis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam hal kebebasan politik sejak era Reformasi, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial melahirkan berbagai persoalan, seperti dominasi elite, politik uang, dan disinformasi digital. Oleh karena itu, penguatan Demokrasi Pancasila perlu diarahkan pada reformasi struktural yang menekankan transparansi, akuntabilitas, literasi politik, serta pengelolaan ruang digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang tidak hanya bebas, tetapi juga beretika, berkeadilan, dan berjiwa Pancasila.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**DAFTAR PUSTAKA**

Cholisin. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: UNY Press.

Fadlail, F. (2023). “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 20(2), 210–220.

Sudrajat, A. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kompas. (2024). Laporan tentang posisi politik Andika Perkasa.

CNN Indonesia. (2024). Laporan tentang dukungan elite dan pengaruh media.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022–2024). Catatan praktik politik uang. Jakarta: KPK.